



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 844/XII/2014

II/DESEMBER 2014



KURIKULUM 2013: DARI BENCI BERAKHIR SUKA

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KURIKULUM 2013: DARI BENCI BERAKHIR SUKA

Awalnya melelahkan, karena harus bersekolah hingga pukul 15.00 WIB sore. Belum lagi tugas pekerjaan rumah yang menumpuk, membuat siswa mengernyitkan dahinya. Namun lambat laun, pola pengajaran yang komunikatif memicu siswa untuk lebih aktif di kelas membuat konsep Kurikulum 2013 mulai disukai para siswa.

Itulah salah satu poin hasil tanya jawab Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan beberapa Siswa Kelas XI SMK Emanuel Pontianak. Keberanian David, yang tampil polos mengutarakan kesannya terhadap penerapan Kurikulum 2013 disambut aplaus dari Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman, baru-baru ini.

Tak mau kalah dengan para siswa, Sohibul, politisi PKS ini pun mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan seputar senang-susahannya siswa mengikuti Kurikulum 2013. “Bukunya belum lengkap semua Pak..!,” demikian jawaban serentak para siswa tanpa dikomando.

Mendengar jawaban para siswa, Sohibul pun mengangguk dan mengacungkan jempol. “Kami akan serap apa yang menjadi keluhan anak-anak untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jawab Sohibul meyakinkan.

Pada saat yang sama Sohibul juga



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR saat meninjau SMK Immanuel Kota Pontianak

menoleh ke Zulfadhli yang berada di sampingnya. Politisi Golkar yang kebetulan berasal dari Dapil Kalimantan ini pun tersipu, dan menambah jawaban Sohibul. “Di sini juga hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, beliau pasti akan bekerja maksimal menyelesaikan masalah buku yang tak kunjung terdistribusi,” ujar Zul, begitu ia biasa disapa.

Lebih lanjut Zul menambahkan, bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum

2013 didukung oleh kesiapan guru dan buku. “Jika selama ini pelatihan guru sudah diberikan, maka justru pola distribusi buku yang lambat ini yang menjadi kendala bersama saat ini,” jelas Zulfadhli.

Selepas dari SMK Emanuel, Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI melanjutkan pantauannya ke SD Muhammadiyah 2 Pontianak, SMPN 23 Kota Pontianak, SMKN 3 dan berakhir di SMPN 10 Pontianak. (oji) foto: Naefuroji/Parle/od

Komisi II DPR Tinjau Layanan Publik di Bali

Layanan publik di Bali sangat baik dan terencana. Hampir tak ada keluhan yang berarti menyangkut akses layanan perijinan sekaligus pengawasan. Setidaknya itulah yang dinilai Komisi II DPR RI saat berkunjung ke kantor Ombudsman dan kantor BPPTSP.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), mengawali kunjungannya ke kantor Ombudsman perwakilan Bali di Denpasar. Tim diterima langsung oleh Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Al Khatab. Menurut Umar, pengawasan terhadap kinerja layanan publik



oleh Pemerintah Provinsi Bali terus dilakukan tanpa pamrih di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

Inspeksi mendadak kerap dilakukan oleh Ombudsman ke kantor-kantor pemerintahan yang menyelenggarakan layanan publik. Pengaduan masyarakat juga terus diterima dan ditelaah dengan menginvestigasi ke lapangan. Awalnya, ungkap Umar, banyak penyelenggara negara di Bali belum mengenal Ombudsman, sehingga sering ditolak masuk untuk melakukan penelitian.

Kini kerja Ombudsman sudah mulai dikenal luas, bahkan sebagian pemerintah kota/kabupaten di Bali menandatangani MoU untuk kerja sama pengawasan. Ini hal yang menggembirakan. Soal anggaran Ombudsman, sepenuhnya diambil dari APBN pusat. Sebagai pengawas di daerah, kantor Ombudsman tidak boleh menerima bantuan apa pun dari Pemda. Ini untuk menjaga independensinya sebagai pelaksana pengawasan di daerah.

Saat Komisi II berkunjung ke kantor tersebut, memang, terlihat sederhana. Bila hujan datang, atapnya bocor dan membasahi ruangan. Ombudsman tak mampu memperbaiki sendiri karena keterbatasan anggaran. Saat yang sama dia juga tak boleh menerima bantuan dan Pemda. Ini dilema tersendiri. Kepada tim Komisi II DPR yang sedang berkunjung, Kepala Ombudsman Bali berharap, agar anggaran setiap kantor perwakilan Ombudsman di daerah ditambah.

Usai meninjau Ombudsman, tim langsung meninjau kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) di Denpasar. Tim diterima langsung oleh Kepala BPPTSP Anak Agung Rai Soeryawan. Tim Komisi II DPR mendengarkan langsung paparan mekanisme pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus ijin ke kantor tersebut.

Pengurusan surat ijin usaha apapun maksimal 14 hari.



Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR kunjungi Kantor Ombudsman perwakilan Bali

Kecuali untuk perijinan tertentu yang membutuhkan peninjauan langsung ke lokasi ijin. Beberapa Anggota Komisi II pun sempat menanyakan langsung layanan perijinan kepada masyarakat di kantor tersebut. Umumnya mereka menilai sangat baik layanan yang diberikan di kantor tersebut. Cepat dan ramah menjadi andalan layanan,

Tim Komisi II yang ikut melakukan kunjungan kerja spesifik ini antara lain, Adian Yunus Napitupulu dan Komaruddin Watubun (keduanya F-PDIP), A.Mujib Rohmat dan Agung Widyantoro (keduanya F-PG), Bambang Riyanto (F-Gerindra), Libert Kristo Ibo (F-PD), Yandri Susanto (F-PAN), Jazuli Juwaini (F-PPS), Asep Ahmad Maosul (F-PPP), Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), dan Frans Agung mula Putra (F-Hanura).

(mh) foto: Husen/Parle/od

Pertamina Belum Siap Hadapi Persaingan Perdagangan Bebas

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Terminal BBM Semarang Group, Harry Poernomo menilai PT Pertamina belum siap menghadapi persaingan perdagangan bebas.

Hal tersebut Harry sampaikan menanggapi paparan GM Pertamina Semarang saat pertemuan Tim Komisi VII dengan Vice President People Management PT Pertamina, GM Pertamina Semarang, Anggota Komite BPH Migas Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah dan Direktur Bareskrim Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin (1/12/2014).

“Kunjungan kami ini sebetulnya pada akhirnya sepakat, tentunya DPR akan mendukung atau berpihak pada Pertamina untuk menghadapi perdagangan bebas, karena subsidi BBM ini semakin hari semakin berkurang,” kata Harry.

Terkait dengan saatnya nanti bila

terbuka pasar bebas BBM, politisi Partai Gerindra ini mengharapkan PT Pertamina memprogramkan berbagai project didalam rangka pembangunan infrastruktur distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi.

“Saya melihat perkembangan yang ada dari paparan tadi menunjukkan belum adanya kesiapan apabila nanti perusahaan-perusahaan lain masuk karena harga BBM sudah mendekati harga keenomian,” jelas Harry.

Oleh karena itu, tegasnya, jika PT Pertamina minta kepada DPR atau kepada pejabat daerah untuk berpihak pada Pertamina, ia meminta PT Pertamina juga secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Pertamina menjadi betul-betul perusahaan yang dibanggakan dan layak dibantu dan dilindungi.

“Karena selama kami berkampanye



Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo

di Dapil kami di Jawa Tengah ini, jika mencari Pertamina di mana-mana kosong, ini fakta. Dan disini kami lihat belum ada Pertamina Plus,” ujarnya.

“Saya tidak tahu apakah ini ekonomis atau tidak, tetapi sudah saatnya Pertamina berpikir lebih maju. Sudah

selayaknya semua produk yang diperdagangkan Pertamina seyogyanya paling tidak di Ibukota Provinsi ini juga tersedia dengan baik,” tambahnya.

Dari pengamatan Harry, sering Pertamina kosong baik di Semarang maupun di Yogyakarta. Harry menyimpulkan bahwa PT Pertamina belum siap menghadapi persaingan perdagangan bebas.

Kepada perwakilan Pemda Jawa Tengah yang hadir, ia minta pemda ketika akan memberikan ijin mendirikan bangunan atau ijin usaha apapun pada PT Pertamina tidak diobral. Demikian pula Harry meminta kepada BPH Migas keberpihakannya.

Harry minta peranan BPH Migas dengan kedudukan dan kewenangannya, karena posisi BPH Migas sangat strategis bukan hanya dalam hal pengawasan atau alokasi kuota tetapi bagaimana caranya juga memfasilitasi dan men-

orong supaya PT Pertamina ini dan jika perlu perusahaan swasta lain juga membangun infrastruktur BBM dan Gas di wilayah seluruh Indonesia.

“Tentunya maksudnya adalah perusahaan domestik sepanjang itu memang tidak menyalahi aturan. Tetapi jangan sampai memberikan kesempatan kepada swasta yang notabene membuka peluang tumbuhnya mafia Migas,” tandasnya.

Sementara kepada Direktur Bareskrim Polda Jawa Tengah yang hadir, Harry yang pernah berkarya di PT Pertamina, minta mengenai masalah penyelewengan BBM ini termasuk juga didalamnya LPG bisa ditingkatkan kembali dan tindakan-tindakan pengawasan maupun penanggulangan penyelewengan migas ini tidak perlu menunggu PT Pertamina dan BPH Migas, karena sudah ada MoU. Polda Jateng bisa bertindak.

“Titik-titik mana yang sangat rawan, kami pikir Pertamina dan BPH Migas sangat tahu persis. Saya tidak percaya jika Pertamina dan BPH Migas bahkan polisi sendiri tidak tahu bagaimana ada penyelewengan ini. Pasti tahu. Hanya masalahnya kadang-kadang ogah-ogahan untuk bertindak,” pungkasnya.

“Ini yang kami harapkan, kesemuanya ini tentunya untuk membangun kekuatan nasional maupun regional wilayah supaya bisa juga mencapai kemandirian ataupun yang sering kita sebut kedaulatan energi,” tambah Harry.

Ia menjelaskan, bahwa kedaulatan energi ini tidak hanya secara nasional tetapi juga wilayah. Oleh karena itu, Harry meminta kepada seluruh pimpinan di Jawa Tengah untuk bagaimana caranya Jawa Tengah ini untuk *sustainable* didalam pemenuhan masyarakat akan kebutuhan energi khususnya bahan bakar minyak dan gas. (sc) foto: suci/parle/hr

Penetapan Upah Pekerja Harus Dievaluasi Ulang



Tim kunker spesifik Komisi IX DPR saat pertemuan dengan Kadis Tenaga Kerja, Ketua Dewan Pengupahan, Ketua Apindo dan Ketua Serikat Pekerja Provinsi Bali

Penetapan besaran upah pekerja menjadi persoalan yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan belum optimalnya pemberlakuan instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.7/2013 tentang Upah Minimum.

Selain itu, penetapan upah yang merugikan pekerja, diakibatkan karena belum adanya sistem pengupahan secara nasional. Untuk itu, diharapkan ada peraturan khusus yang dilahirkan pemerintah dalam melaksanakan sistem pengupahan secara nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri, dalam pertemuan antara tim kunker spesifik Komisi IX dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ketua Dewan Pengupahan, Ketua Apindo dan Ketua Serikat Pekerja Provinsi Bali, di Provinsi Bali, Selasa (2/12).

“Perlu re-evaluasi hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang merupakan dasar penetapan upah minimum pekerja dari 60 item menjadi 84 item terlebih dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk itu, pekerja meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan revisi penetapan upah minimum dengan memasukkan penambahan nilai presentase efek

kenaikan BBM,” kata Syamsul.

Sebagaimana diketahui, penetapan besaran upah dilakukan setiap tahun sekali atas kesepakatan dari Serikat Pekerja/Buruh dengan Asosiasi pengusaha yang termasuk dalam Dewan Pengupahan. Pengejawantahan dari hak penghidupan yang layak telah dituangkan dalam penetapan upah minimum pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.7/2013 tentang Upah Minimum.

“Penetapan upah minimum pekerja pada hakekatnya sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak merosot tajam pada titik terendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja dengan besarnya pertumbuhan angka pekerja di Indonesia. Namun di lapangan, upah minimum telah bergeser dari tujuan awal sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Politisi Golkar ini.

Provinsi Bali, tambah Syamsul, merupakan provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi tahun 2014 di seluruh Indonesia yaitu mencapai 30,62% dari UMP tahun 2013 sebesar Rp 1.181.000,- meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 1.542.600,-. Sementara di tahun 2015 capaian kenaikan UMP Bali termasuk rendah yaitu sebesar 5,09% atau Rp 1.611.172,- sedangkan nilai KHL sebesar Rp 1.612.818,-.

Sementara itu, Ketua DPB SPSI Bali



yang juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bali, Wayan Madre mengemukakan bahwa pihaknya memang dilema ketika hendak menentukan upah tinggi di daerah-daerah lain selain Denpasar, Badung dan Gianyar. Pasalnya, ke tiga daerah itu merupakan barometer daripada daerah pariwisata dan ekonomi, sehingga perkembangannya lebih bagus dibanding daerah lainnya.

“Kalau acuan saya secara pribadi barangkali upah apa yang kita buat sekarang ini jauh, sebab kehidupan di Denpasar, Badung dan Gianyar ini bukan main biaya hidupnya tinggi. Tetapi kalau ini kita lakukan sebagai acuan untuk menentukan upah harus tinggi, rekan-rekan kami di kabupaten lain seperti Jembrana, Buleleng, Bangli, Klungkung itu apa mereka bisa menge-

jar? Inilah kesulitan saya selaku Wakil Serikat Pekerja,” tutur Madre.

Oleh karena itu, ia berharap kepada Serikat Pekerja untuk menunjukkan kemampuannya dan kemampuan daerahnya masing-masing, sehingga dapat meraih hasil yang lebih tinggi sesuai dengan perekonomian yang ada di daerah tersebut. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Anggota DPR Desak Pemerintah Buat Kartu Diskon Nelayan

Anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir menginginkan Pemerintah membuat Program Kartu Diskon Nelayan, yang dipergunakan membeli Solar untuk bahan bakar perahu nelayan. Hal ini karena dia melihat subsidi solar untuk nelayan pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran.

“BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi ini untuk nelayan yang mana ?” tanya Inas, karena dalam kunjungan Komisi VII, Senin (1/12), di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Indramayu dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Banker Pelabuhan Ke Jawanan Cirebon. Dia melihat juragan besar yang menikmatinya.

Menurut Inas, Pemerintahan Presiden Joko Widodo jangan hanya terbatas hanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Sejahtera, Kasih Nelayan yang tepat sasaran yaitu kartu diskon BBM untuk nelayan. Itu yang benar-benar tepat sasaran kepada nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil. Kartu Diskon dengan nama bersangkutan sudah tertera disitu dan ada chipnya.

Pada kunjungan itu, dia tidak melihat nelayan yang benar-benar susah, mereka tidak memperlakukan BBM naik, asalkan BBM tetap tersedia. Misalkan pemilik kapal mempunyai lebih 100 dari kapal di bawah 30 GT, apakah pantas untuk tetap disubsidi. “Persoalannya apakah pantas dia (Juragan Nelayan) mendapatkan BBM bersubsidi?,” ungkapnya lagi.

Maka harus dilakukan pendataan terkait nelayan yang pantas untuk mendapatkan subsidi BBM, melalui Kartu Diskon Nelayan. “Harus didata dengan benar nelayan yang memiliki kapal sendiri memang untuk mencari nafkah dengan kapalnya, itulah yang harus disubsidi, bukan juragan kapal yang disubsidi. Ini salah sasaran kepada cukung-cukong. Para cukung yang dapat subsidi, bukan nelayan kecil. Ini yang harus



Tim Kunker Komisi VII DPR saat meninjau persediaan solar nelayan di Indramayu

dihindari,” katanya.

Dia setuju BBM subsidi solar juga dihapuskan, karena menguntungkan orang-orang tertentu, termasuk mafia migas yang melakukan pencurian dan memainkan harga subsidi. Dengan kartu tersebut otomatis nelayan yang jadi ‘juragan’, tidak mendapat kartu.

“Kuota akan berkurang banyak jika digunakan untuk kapal yang besar-besar. Dengan adanya kartu tersebut, otomatis juragan nelayan besar jangan dikasih,” tegas politisi Inas dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Banten III. (as), foto: agung sulistiono/parle/hr.

UU Desa Belum Dapat Diterapkan di Bali

Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI bertemu Gubernur Provinsi Bali I Made Pastika untuk mengetahui sekaligus bertukar informasi dan pengetahuan tentang implementasi berbagai UU yang dihasilkan DPR di Pulau Dewata tersebut.

Bertempat di Kantor Gubernur, Denpasar, Bali, tim kunjungan kerja

(Kunker) spesifik Komisi II DPR diterima langsung oleh sang gubernur, Rabu (3/12). Tim Komisi II yang dipimpin Ahmad Riza Patria bertanya banyak hal seputar implementasi berbagai produk UU yang telah dihasilkan DPR. Di antaranya yang sangat bermasalah di Bali adalah UU Desa, yang hingga kini tak bisa diterapkan di Bali.

Gubernur Bali mengungkapkan, banyak kampung adat di Bali yang tak bisa menerima bantuan dari luar, karena aturan adatnya seperti itu. Dengan kearifan lokal yang berlaku, penduduk kampung adat di Bali tak bisa dimasuki oleh sembarang orang dari luar. Inilah yang menyulitkan Pemprov Bali dalam mengimplementasikan UU Desa di



Tim Kunker Komisi II DPR saat pertemuan dengan Gubernur Bali

wilayahnya.

DPRD Provinsi Bali sendiri, kata Gubernur, sudah membentuk Pansus untuk membahas hal ini dan akan ditunggu solusinya. Di Bali ada desa Pahraman yang memiliki otonomi *full*, hampir tak bisa diakselerasi oleh pemerintah

setempat. Mereka punya aturan izin sendiri hingga memutus pengadilan bagi warga desanya. Desa Pahraman, lanjut Gubernur, adalah roh Bali. Di desa model itulah kekhasan Bali terekspose. Warga desanya menganut Hindu.

Pada bagian lain, tim Komisi II DPR

juga menanyakan perihal implementasi moratorium CPNS oleh pemerintah pusat. Menurut Gubernur, pada prinsipnya Pemprov Bali setuju dengan moratorium tersebut, kecuali bagi para tenaga ahli tertentu seperti dokter, perawat, dan tenaga metrologi, serta teknisi jalan. Para guru khusus seperti guru agama dan guru untuk SLB masih sangat dibutuhkan di Bali.

Sejak usia pensiun diperpanjang hingga usia 58 tahun, moratorium saat ini dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan pegawai, kata Gubernur Bali. Ketua Tim Kunker Komisi II Riza Patria mengatakan, komisi yang dipimpinnya ingin mengetahui lebih banyak program kerja Pemprov Bali terutama di sektor layanan publik. Informasi yang didapat akan menjadi kajian dan masukan berharga untuk dikonfirmasi dengan program pemerintah pusat.

(mh) foto: husen/parle/iw

Impor 500 Kapal Bisa Matikan Industri Galangan Kapal Dalam Negeri



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

Komisi VI DPR di ruang rapat Gedung Nusantara I, Rabu, (3/12) siang menerima pengaduan Masyarakat Industri Galangan Kapal dipimpin Ketua Umumnya Eddy Kurniawan Logam. Mereka meminta DPR Komisi VI untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terhadap Industri Galangan Kapal tersebut.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, Keputusan pemerintah yang menjadikan Indonesia poros maritim menjadi pintu masuk meningkatkan industri Galangan kapal dan diharapkan bisa menjadi industri di

rumah sendiri.

Tetapi lanjutnya, Pemerintah sudah memutuskan untuk impor 500 kapal, sementara masyarakat industri galangan kapal tidak diajak ikut serta dalam hal pengadaan kapal ini.

“Impor kapal akan menekan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri bahkan ke depan, akan mematikan industri galangan kapal yang saat ini berjumlah kurang lebih 300 se-Indonesia termasuk yang ada di Batam,” tegas Hafisz.

Untuk itu, Komisi VI dalam waktu dekat akan mengundang untuk Raker dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan serta Rapat Dengar Pendapat dengan Pelindo. Intinya Komisi VI akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kawasan Industri Galangan Kapal.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan bahwa industri Galangan Kapal merupakan industri pembuatan dan perawatan kapal dimana jenis usaha industri galangan kapal ini adalah padat karya, padat modal dan padat teknologi.

Keberadaan dok dan galangan kapal

sangat diperlukan dalam mendukung industri pelayaran yang sangat berperan terhadap kelancaran pasokan logistik nasional serta program *short sea shipping (coastal shipping)*. Keberadaan galangan akan menyerap tenaga kerja usia produktif dalam jumlah besar.

Eddy Kurniawan juga mengeluhkan, rencana penggusuran industri galangan kapal dari pelabuhan tidak sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2008 pasal 75 ayat 4 dan pasal 85. Tarif sewa lahan di Pelabuhan sangat tinggi (sebagai contoh untuk tarif sewa tanah pelabuhan di Pelindo III sebesar Rp.45.000/meter dan Pelindo II kurang lebih Rp.160.000/meter). Sedangkan sesuai dengan tarif sewa tanah dan perairan sesuai dengan PP No.6 Tahun 2009 tentang pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.1.000,-

Menurutnya, ijin sewa tanah pelabuhan hanya diberikan oleh pengelola pelabuhan selama enam bulan sampai dengan satu tahun. Sedangkan bidang usaha pembangunan kapal pada galangan kapal memerlukan waktu *multi years*, sehingga tidak ada kepastian usaha pada galangan kapal. (Spy)/foto :iwan armanias/parle/hr.



Perlu Aturan Soal Pengecer BBM Di Wilayah Terpencil



Tim kunjungan Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Totok Daryanto saat pertemuan dengan jajaran Pemprov Kalteng, Pertamina, BPH Migas, dan Kepolisian

Minimnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sebuah daerah-daerah terpencil memunculkan kehadiran pengecer-pengecer BBM penjual BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Karena perlu ada payung hukum melegalkan kehadiran pengecer BBM ketika pemerintah dalam hal ini Pertamina belum menyediakan outlet atau SPBU yang memasok kebutuhan BBM untuk masyarakat.

Demikian salah satu kesimpulan dari rapat Komisi VII DPR dengan unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, PT Pertamina, BPH Migas, dan jajaran Kepolisian di Palangkaraya, Senin (1/12). Rombongan Komisi VII DPR dipimpin oleh Totok Daryanto selaku Ketua Tim Kunjungan Spesifik dengan sejumlah anggota Komisi VII DPR, Neni Moerniaeni (Fraksi Partai Golkar), Katherine A Oendoen (Fraksi Partai Gerindra), M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN). Dari jajaran Pemrov Kalteng, hadir Asisten 2 Sekda Pemrov Kalteng, Syahrin Daulay serta M Franshurullah Asa dari BPH Migas.

Menurut Totok Daryanto, pihaknya tengah mencari solusi agar kehadiran para pengecer itu tidak dianggap melanggar hukum. "Jadi pengecer-pengecer itu pada dasarnya adalah cara swadaya dari masyarakat untuk mengatasi kebutuhannya sendiri, ketika Pertamina belum bisa menyediakan SPBU BBM bersubsidi. Kita mengharapkan dengan itu diatur, menjadikan lebih terkendali baik dari sisi distribusi serta harganya yang sampai ke masyarakat," kata Totok Daryanto.

Sementara itu, M Franshurullah Asa dari BPH Migas yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan jika dilihat dari pendekatan hukum, kehadiran para pengecer BBM itu sebenarnya salah. Meski begitu, para pengecer sangat bermanfaat bagi daerah-daerah tertentu. "Ada bahasa mengenai pengecer ini yakni ilegal bermanfaat. Dia (pengecer) ilegal tapi bermanfaat pada kondisi tertentu karena Pertamina belum mampu hadir di kabupaten-kabupaten terpencil," katanya.

Franshurullah menilai kalau menga-

cu pada UU Migas, keberadaan para pengecer itu jelas menyalahi, karena pengecer harus resmi terdaftar sebagai penyalur di Pertamina. "Jadi harus ada izin niaganya. Tapi para pengecer itu kan nilai omsetnya kan kecil. Tidak mungkin pengecer itu punya izin niaga, karena kalau punya izin niaga omsetnya hingga milyaran rupiah. Jadi ngga mungkin mereka punya izin niaga," jelasnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Sekda Provinsi Kalteng, Syahrin Daulay mengatakan Pemrov Kalteng saat ini concern terhadap pembangunan SPBU di wilayah-wilayah terpencil. "Kalau di kota, masih bisa ditangani," ujarnya.

Pihaknya tidak serta merta menyalahkan hadirnya para pengecer BBM tersebut. "Bagaimanapun mereka (pengecer) adalah warga negara kita juga. Bukan berarti kesalahan (pengecer), tapi karena kita pemerintah ini tidak bisa membangun SPBU kesana," ujarnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pertambangan Pemrov Kalteng, Syahril Tarigan mengatakan, saat ini larangan terhadap pengecer BBM itu hanya pada aturan dimana setelah dari SPBU, BBM tidak boleh dijual kembali. "Ini payung hukum yang ada sekarang, tapi ada juga aturan yang mengatakan dalam radius berapa kilometer dari SPBU boleh ada pengeceran," jelasnya.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR selain meninjau penyaluran BBM bersubsidi, rombongan Komisi VII DPR juga melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU di kota Palangkaraya. (nt), foto :

nita juwita/parle/hr.

Pemda Harus Miliki Informasi PBB-KB Untuk Pungut Pajak

Komisi VII DPR mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki informasi yang cukup terkait penggunaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) agar Pemda tidak kehilangan memungut pajak yang menjadi hak Pemda.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi VII DPR Totok Daryanto (FPAN) saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, PT Pertamina, BPH Migas,

dan jajaran Kepolisian di Palangkaraya, Senin (1/12). Anggota Komisi VII DPR yang ikut dalam rombongan Tim Komisi VII DPR ke Palangkaraya, diantaranya, Neni Moerniaeni (Fraksi Partai Golkar), Katherine A Oendoen (Fraksi Partai Gerindra), M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN). Dari jajaran Pemrov Kalteng, hadir Asisten II Sekda Pemrov Kalteng, Syahrin Daulay serta M Franshurullah Asa dari BPH Migas.



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI Totok Daryanto

Menurut Totok, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda harus memiliki informasi yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi dan non sub subsidi termasuk informasi yang menyangkut kategori pajak. “Ada

beberapa perusahaan yang bergerak dalam niaga BBM tapi digunakan untuk kendaraan bermotor misalnya industri, data-data soal itu banyak belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” katanya.

Untuk itu DPR kata Totok, akan mendorong supaya instansi-instansi pemerintah di tingkat vertikal seperti BPH Migas dan Kementerian ESDM bisa memberikan informasi ke daerah-daerah yang memerlukan data-data seperti itu. “Pemda juga kita dorong supaya proaktif untuk mendapatkan data-data itu secara akurat supaya nanti tidak kehilangan kesempatan untuk memungut pajak yang menjadi hak pemda,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, politisi dari PAN itu juga menekankan kembali penambahan jumlah SPBU di Palangkaraya. “SPBU tidak harus yang gede-gede, tidak usah milyar milyaran pembangunannya. Mungkin bisa ditekan di angka ratusan atau puluhan juta, apalagi sekarang kan banyak teknologi terapan yang bisa dilakukan dalam membangun itu,” ujarnya.

Misalnya saja, soal teknologi penggunaan drum untuk penyaluran BBM di SPBU yang secara teknis bisa dibuat. Namun harus ada izin resmi dari Pertamina. “Yang terpenting adalah kemauan dan kerja keras melayani masyarakat. Saya kira itu yang paling penting,” katanya. (nt), foto: nita juwita/parle/hr.

Bali Kekurangan Guru Bahasa Daerah

Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyangkan adanya daerah yang kekurangan guru bahasa daerah di sekolah. Padahal bahasa daerah saat ini menjadi muatan lokal. Hal tersebut diungkapkannya saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, Rabu (3/12).

“Tadi dikatakan bahwa di Bali kekurangan guru bahasa Bali, karena beberapa hal, pertama belum adanya sertifikasi untuk guru bahasa daerah. Selain itu banyaknya guru bahasa Bali yang sudah memasuki masa pensiun,” jelas Eko.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PAN ini, jika pun kepala sekolah ingin mengangkat guru honorer untuk bahasa Bali, hal ini akan menimbulkan masalah hukum, karena proses penggajannya menggunakan anggaran BOS (bantuan operasional sekolah), sementara BOS peruntukannya bukan untuk membayar gaji guru.

Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI mendapat pengaduan atau masukan dari Kepala PGRI Bali terkait sulitnya guru bahasa Bali untuk bisa masuk dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sehingga guru bahasa Bali tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Ditambah lagi dengan banyaknya guru bahasa Bali yang sudah memasuki masa pensiun. Beberapa hal tersebut yang pada akhirnya membuat sekolah formal di Bali kekurangan guru bahasa



Anggota Komisi X DPR RI saat Rapat dengan jajaran Pemda Bali daerah.

Atas aduan tersebut, Eko berjanji akan mendiskusikannya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari jalan keluar atau solusi. Bahkan jika memang harus merevisi undang-undang atau aturan yang telah ada sebelumnya, demi tercapainya sistem pendidikan yang baik hal itu pun akan dilakukan. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Komisi VI Dorong Batam Jadi Pintu Masuk Asean

Komisi VI DPR akan mendorong agar Batam bisa menjadi pintu masuknya ASEAN, karena lokasinya sangat dekat dengan lintas pelabuhan perempatan dunia. Bahkan Batam sesungguhnya bisa dikatakan sebagai daerah yang paling strategis untuk lalu lintas perekonomian dan perdagangan.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz

Tohir usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Senin (1/12).

Kunjungan ini sebagai *follow-up* Rapat Komisi VI dengan Badan Pengelolaan Batam dimana mereka minta dukungan kepada DPR mendapatkan dana dari APBN untuk pema-

ngunan infrastruktur. Selama ini, kata Achmad Hafisz, Batam masih mempunyai kendala baik dari perijinan maupun koordinasi terhadap pemerintahan kota setempat.

Melalui kunjungan ini pula, Komisi VI ingin melihat seperti apa nanti pola pembangunannya, dan bagaimana daerah itu bisa membangun infrastruktur sesuai dengan kondisinya. Menurut laporan mereka membutuhkan penambahan pulau yang ada di seberang pelabuhan tersebut, namun pulau tersebut tidak masuk dalam wilayah otorisasi Badan Pengelola Batam.

“Kunjungan Spesifik ini menjadi sangat bermakna, kita tidak bisa memutuskan apa-apa kalau tidak melihat kondisi di lapangan,” kilah Hafisz.

Lebih lanjut Achmad Hafisz mengatakan, kunjungannya kali ini untuk melihat lebih jauh bagaimana sesungguhnya perkembangan Batam setelah era otorita menjadi Badan Pengelolaan. “Ini era baru, mereka bukan lagi dibawah otorita, maka dari itu kami tidak ingin membawa keputusan yang tidak berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya.

Dari kunjungan itu, lanjut Achmad Hafisz, dia menyaksikan apa yang dilihat beberapa Pelabuhan memang menjanjikan PNBM yang luar biasa. Komisi VI juga menyaksikan rencana Pembangunan Pelabuhan Kabil, dimana kapal-kapal di lokasi itu menunggu muatan sampai dua minggu. Mestinya hal seperti ini tidak boleh terjadi kalau infrastruktur dibangun dimana untuk membangun infrastruktur tersebut memerlukan biaya.

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2007 Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas selama jangka waktu 70 tahun berupa kontrak pengelolaan lahan. Begitu selesai, maka semua aset yang berada di lahan riil dikembalikan ke Pemerintahan Indonesia cq Badan Pengelolaan Batam. Hal ini sebagai penarik saja, karena investor



Tim Kunker Spesifik Komisi VI ke Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam

menginginkan suatu pegangan sebagai jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha.

Di bagian lain, Hafisz Tohir mengharapkan, ke depan koordinasi pemerintah dengan DPR tidak seperti ini lagi, dengan menyatunya KIH dan KMP dan ditandatangani kesepakatan damai tanggal 17 November lalu hubungan anggota telah cair. Itu sudah mulai terlihat pada kunker spesifik dimana para anggota dari fraksi Nasdem, PKB dan PPP sudah berjalan bersama.

“Ke depan memang tidak ada jalan lain, Kementerian-Kementerian Kabinet Kerja harus melakukan Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan DPR karena mau tidak mau kita akan membicarakan tentang anggaran, dimana anggaran ini domainnya DPR” kata Hafisz menambahkan.

(Spy) foto: Supriyanto/Parle/od.

DPR Dipercaya Jadi Tuan Rumah Komite Ekonomi APA



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Anggota BKSAP Hamdhani saat menghadiri Sidang APA di Lahore, Pakistan

Sidang Pleno Ketujuh *Asian Parliamentary Assembly (APA)* menetapkan DPR sebagai tuan rumah sidang *Standing Committee on Economic Matters*.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan diplomasi parlemen DPR menyatakan kesiapan melaksanakan agenda Majelis Parlemen Asia

tersebut.

“Iya ini sebagai satu bentuk kepercayaan kepada DPR dari Sidang Pleno APA yang baru saja berakhir, tentu akan kita laksanakan karena UU juga mengamanatkan DPR perlu mengambil peran,” kata Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon usai acara penutupan Sidang Pleno Ketujuh APA di Lahor, Pakistan, Rabu (4/12/14).

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini menambahkan sidang *standing committee* ini diperkirakan akan dilaksanakan pertengahan tahun depan. Kegiatan ini merupakan pertemuan pendahuluan menjelang Sidang Pleno Kedelapan APA yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun 2015 nanti di Phnom Penh, Kamboja.

Sementara itu Ketua Komite Ekonomi pada Sidang Pleno Ketujuh APA Ham-

dhani menyatakan pertemuan selama 3 hari di Lahore telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dalam Deklarasi Lahore ditegaskan keinginan untuk Pasar Energi Asia yang terintegrasi.

“Kekuatan energi paling dominan itu ada di Asia Barat, sekarang kenapa kekuatan itu tidak kita arahkan ke

timur atau selatan Asia sehingga dapat memperbaiki ketahanan energi mereka. Ada semangat Asia disitu karena selama ini sumber daya energi Asia banyak mengalir ke wilayah lain,” tandas politisi FP Nasdem ini.

Hal lain yang mengemuka dalam resolusi sidang yang dihadiri 23 negara

itu adalah pentingnya urgensi mewujudkan Asia yang lebih hijau. Itu bisa dicapai dengan memperbaiki kualitas udara, menjamin pengurangan emisi berbahaya, melakukan langkah penghijauan dan meminimalkan dampak perubahan iklim. (iky) foto: m ibnur kholid/parle/hr

Komisi IX DPR Soroti Upah Minimum Provinsi Bali

Komisi IX DPR RI menyoroti Upah Minimum Provinsi (UMP) di Bali dimana para pekerja mengalami kesulitan karena adanya disparitas yang sangat tajam antara kabupaten-kabupaten yang ada. Karena itu ada usulan diterapkannya Upah Minimum Nasional (UMN) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai acuan dari UMP.

“Jadi inilah yang sedang kita cari bagaimana formula-formula itu bisa kita temukan sehingga ada keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja, sehingga tercipta harmoni yang sama-sama bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri kepada Parle di sela-sela pertemuan tim kunker spesifik Komisi IX dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ketua dewan Pengupahan, Ketua Apindo, dan Kektua Serikat Pekerja Provinsi Bali, Selasa (2/12).

Persoalannya, lanjut Syamsul, apakah itu bisa diterapkan UMN dan UMK sebagai acuan dari UMP, dan bagaimana merumuskan sebuah kebijakan nasional tentang upah minimum. “Tadi ada juga yang mengusulkan perlu adanya



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

standarisasi upah nasional, ini tentu masukan yang sangat baik buat Komisi IX untuk menjadi bahan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah nantinya,” jelasnya.

Menurutnya, dari temuan-temuan itu nanti Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan akan melaporkan kepada menteri terkait dan memikirkan bersama bagaimana UMP, UMN dan UMK itu bisa diterapkan sehingga bisa memuaskan para pihak yang terkait dengan itu.

“Ini merupakan bahan yang berharga untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah untuk bisa mengam-

bil kebijakan-kebijakan terbaik untuk tenaga kerja kita dan juga tentu memperhatikan kepentingan dunia usaha kita,” tegasnya.

Menyinggung masalah demonstrasi para pekerja yang ada di Bali, Syamsul mengatakan demo yang terjadi di Bali mungkin tidak terlalu seglamour di provinsi-provinsi lain, karena di Bali ada semacam kesepakatan. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata harus dijaga secara bersama-sama. Sebagai daerah utama tujuan wisata, Bali harus kondusif dengan aspek-aspek keamanan termasuk demo para pekerja bisa dikendalikan dengan baik.

“Intinya Komisi IX melakukan kunjungan spesifik ke tiga daerah yaitu Bali, Manado dan DIY untuk mencari informasi dan data-data yang terkait bagaimana kebijakan upah minimum diterapkan di ketiga daerah itu. Dengan demikian, saat bertemu dengan pemerintah kita sudah memiliki informasi yang lengkap untuk berdiskusi dalam rangka menetapkan kebijakan yang terbaik di sektor ketenagakerjaan,” kata Syamsul. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw

Gubernur Bali Belum Terima Petunjuk Kartu Indonesia Pintar

Komisi X DPR RI menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Bali. Salah satunya terkait keberadaan Kartu Indonesia Pintar.

“Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan

menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pendidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun,” ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Rabu (3/12) di Kantor Gubernur Bali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X, Nuroji



X, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.

“Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan

sama, proses pendistribusiannya juga sama,” jelas Nuroji.

Ditambahkannya, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklatur pun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya pun jelas.

“Saya bukan tidak setuju dengan pro-

gram ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklatur, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,” tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Komisi III DPR Pertanyakan Penanganan Korupsi 2014

Sejumlah anggota komisi III DPR mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam *fit and proper test* di DPR. Pertanyaan tersebut diantaranya yaitu soal penanganan kasus korupsi tahun 2014.

Anggota DPR Dwi Ria Latifah dari PDIP mempertanyakan proses seputar penanganan kasus korupsi tahun 2014. Kemudian Muslim Ayub dari Fraksi PAN menanyakan statement Busyro sebagai pimpinan KPK yang menyebut gaya hidup anggota DPR hedonis dan bermewah-mewahan dan statement bahwa parpol adalah sumber pendidikan koruptor.

“Sebagai penegak hukum hindari



Anggota DPR Dwi Ria Latifah

pernyataan ini. Mohon seandainya terpilih kembali pernyataan ini dihindari.

Saya orang biasa saja, tidak mampu dan tidak ada keinginan saya menjadi koruptor di lembaga ini,” kata Muslim Ayub.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengharapkan para anggota dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pasalnya, ini merupakan *fit and proper test* calon Pimpinan KPK. “Beliau sekarang sedang diuji sebagai calon bukan sebagai pimpinan yang saat ini masih aktif. Jangan ditanya soal penanganan kasus. Kalau bisa lebih luas lebih tajam,” kata Benny kepada forum rapat *fit and proper test* di Komisi III gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12). (Sugeng) foto: eka hindra/parle/hr.

BPK Temukan Penyimpangan Senilai Rp 30,87 T

Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan telah diserahkan kepada DPR. Penyerahan buku ini sebagai masukan kepada DPR dan pemerintah, terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

Pada paparannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis menjelaskan, pada semester I tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan, karena bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan BPK. Namun tidak mengurangi program pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang telah direncanakan.

“Selama semester I tahun 2014, Harry menjelaskan, BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan yang terdiri

dari 559 objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek PDTT. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun,” jelasnya di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (2/12/14).

Dari jumlah tersebut, tambah Harry, terdiri dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.323 kasus senilai Rp 30,87 triliun dan 6531 kasus kelembagaan sistem pengendalian intern (SPI).

Dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 4.900 kasus senilai Rp 25,74 triliun mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan keuangan penerimaan.

“Rekomendasi BPK terhadap kasus-



Ketua BPK Harry Azhar Azis

kasus tersebut antara lain berupa penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara dan daerah serta perusahaan,” tambahnya.

Sedangkan, ditemukan ketidakpatuhan yang lain sebanyak 2.802 kasus kelembagaan administrasi dan 621 kasus senilai Rp5,31 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

“Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan tindakan

administratif atau korektif lainnya,” urai Harry.

Selama proses pemeriksaan, tambah Harry, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian

dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah perusahaan senilai Rp 6,34 triliun.

Dalam kesempatan itu, selain menyerahkan buku IHPS dan LHP, BPK

juga menyerahkan buku ikhtisar hasil pemeriksaan lima tahun BPK (IHPL) yang meliputi hasil pemeriksaan dari semester II tahun 2009 hingga semester I tahun 2014. (sf) foto: Naefuroji/Parle/od

DPR Minta Masalah Buruh Migran Jadi Perhatian APA



Anggota BKSAP DPR Syofwatillah Mohzaib dalam Sidang APA di Lahore

Delagasi DPR RI meminta isu buruh migran menjadi perhatian peserta Sidang Pleno ketujuh *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Lahore, Pakistan 1-3 Desember. Sebagai bentuk keberpihakan Sidang APA yang dihadiri 23 negara patut mengadopsinya dalam rancangan resolusi.

“Indonesia meminta dukungan anda untuk mengadopsi rancangan resolusi

karena menunjukkan komitmen APA dalam menghormati hak-hak migran, pada saat yang sama melambangkan prinsip bertetangga, persahabatan yang baik dengan cara saling menghormati,” kata juru bicara delegasi Indonesia Syofwatillah Mohzaib dalam sidang Komite Sosial dan Budaya di Lahore, Pakistan, Selasa (2/12/14).

Ia mengingatkan DPR pernah menjadi

tuan rumah sidang APA pada tahun 2011 yang khusus membahas masalah buruh migran. Resolusi tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran di Asia berhasil disepakati. Sidang di Pakistan kali ini seharusnya dapat menetapkan langkah yang lebih maju.

Dalam pertemuan tersebut juru bicara delegasi Parlemen Nepal Rajan Bhattarai meminta perhatian anggota parlemen Asia tentang pentingnya mencari solusi terhadap masalah perdagangan manusia (human trafficking).

“Sidang Pleno APA perlu mencari solusi bagi perdagangan perempuan muda yang terjadi baik di timur maupun di selatan Asia,” tekannya dengan nada prihatin.

Sementara itu, Delegasi dari Afghanistan mengingatkan masalah perdagangan narkoba bukan persoalan negaranya semata tetapi masalah dunia secara keseluruhan. Sidang kemudian menyepakati hal paling penting dalam kasus ini adalah bagaimana menyiapkan dukungan internasional untuk pertanian alternatif. (iky) foto: Ibnur Khalid/Parle/od

Jumlah SPBU di Palangkaraya Masih Kurang

DPR meminta Pertamina menambah jumlah keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dirasa kurang untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi VII DPR Totok Daryanto (F-PAN) kepada Parlemen disela kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin, (1/12) kemarin. Kunjungan spesifik Komisi VII DPR selain meninjau penyaluran BBM bersubsidi, juga melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU di kota Palangkaraya.

“Di Palangkaraya ini, SPBU dirasakan masih kurang dan Pertamina juga sudah menyadari dan akan diupayakan un-

tuk segera menyediakan penambahan fasilitas SPBU untuk kepentingan masyarakat supaya semua bisa mendapatkan BBM subsidi,” kata Totok.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sudah menyampaikan persoalan kurangnya jumlah SPBU di Palangkaraya kepada Pertamina. Pertamina, kata Totok, bahkan sudah menyanggupi untuk menambah jumlah SPBU. “Pertamina juga sudah menyanggupi dan sedang dicari alternatif-alternatif lain, termasuk jenis SPBU yang lebih kecil dari yang ada sekarang. Ini termasuk yang jadi pertimbangan Pertamina, agar masyarakat lebih mudah terlayani,” ujarnya.

Minimnya jumlah SPBU berdampak pada hadirnya penge-



Ketua Tim Komisi VII DPR Totok Daryanto

cer BBM yang menjual harga lebih tinggi kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap, daerah yang belum terlayani hadirnya SPBU, diharapkan Pemda bisa membuat aturan supaya tidak tumpang tindih, misalnya saja di dekat SPBU jangan sampai ada pengecer termasuk juga tempat yang jauh yang belum terlayani SPBU bisa dengan diatur oleh Pemda

bersama dengan Pertamina. Karena sekarang ini harga di pengecer berlipat lipatan, dari harga normalnya,” katanya.

Terkait kunjungannya ke sejumlah SPBU, Totok mengatakan Palangkaraya termasuk daerah normal yang tidak mengalami antiran BBM pada saat pemerintah menaikkan harga BBM baru-baru ini. “Artinya kebutuhan masyarakat cukup, berarti masyarakat secara tidak langsung terpenuhi untuk kebutuhan dari BBMnya,” ujarnya.

Lain halnya dengan situasi pada tahun 2012, dimana Palangkaraya sempat terjadi antrian BBM yang cukup tinggi. “Karena pada saat itu kuotanya kurang untuk daerah di sini. Tetapi sekarang kelihatannya sudah cukup perhitungannya sudah benar atau mungkin semakin baik tata kelolanya sehingga tidak ada perembesan BBM bersubsidi ke industri,” jelasnya.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR juga dihadiri, sejumlah anggota Komisi VII DPR diantaranya, Neni Moerniaeni (Fraksi Partai Golkar), Katherine A Oendoen (Fraksi Partai Gerindra), M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN). (nt) foto: nita juwita/parle/hr

Hamdhani Pimpin Sidang Komite Ekonomi

DPR RI terpilih secara aklamasi untuk memimpin Komite Ekonomi dalam *Plenary Session* Ketujuh Asian Parliamentary Assembly di Lahori, Pakistan, 1-3 Desember. Ketua Delegasi Indonesia Fadli Zon memutuskan kehormatan untuk memimpin jalannya sidang diberikan kepada anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hamdhani.

“Tentu ini kehormatan dan tantangan bagi saya bagaimana memimpin jalannya Sidang Parlemen Internasional. Banyak terjadi perdebatan seperti Delegasi Kamboja, China, Pakistan yang menekankan, mereka ingin ada keseimbangan pembangunan perekonomian di kawasan Asia. Pengelolaan ekonomi harus ada keseimbangan, jangan ada satu negara GDP-nya tinggi lainnya rendah,” kata politisi Nasdem ini usai

rapat.

Ia menyebut sejumlah isu mengemuka dalam persidangan diantaranya tentang *climate change*, Protokol Kyoto yang seharusnya didukung negara maju, ketidakseimbangan pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Isu kemiskinan lanjut Hamdhani juga mendapat perhatian. Pengentasan kemiskinan sangat kompleks dan memiliki tantangan lokal, nasional, regional dan global multi dimensi seta tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional negara untuk pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu anggota delegasi Iran Hossein Nejar meminta perhatian peserta sidang agar rencana pembangunan pipa gas dan BBM yang melintas dari negaranya menuju Pakistan dan India dapat segera direalisasikan. Kerja



Anggota BKSAP Hamdhani saat memimpin Sidang Komite Ekonomi

sama ini diharapkan dapat mendukung penyebaran energi dan mendukung pembangunan di sejumlah negara.

Zhao Baige, Ketua Delegasi Tiongkok mengingatkan kawasan Asia sering menghadapi bencana alam yang terlambat diantisipasi. “65 persen bencana alam terjadi di Asia, persiapan menghadapi bencana dan strategi pasca bencana berdasarkan *community-based* perlu dilakukan,” tekan dia. (iky) foto: m ibnur khalid/parle/ry

DPR Ingin Percepat Bahas Revisi UU MD3

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menegaskan, pihaknya tidak ingin segera menyelesaikan masalah revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Namun, karena masih terdapat perbedaan pendapat antar fraksi, sehingga pembahasan pun cukup berlarut-larut.

“Kita ingin benar-benar memper-

cepat proses ini supaya DPR bisa menjalankan fungsinya secara utuh. Kalau bicara soal sah sebenarnya sudah sah karena DPR sudah berjalan. Namun menjadi tidak enak kalau ada teman-teman (Anggota DPR) yang belum terakomodasi,” kata Politisi F-PAN ini.

Hal itu dinyatakan Totok dalam diskusi publik bertema “Revisi UU MD3,

Tarik Menarik Tiga Kekuatan KIH, KMP dan DPD” di Press Room, Gedung Nusantara III, Selasa (2/11/14).

Totok menjelaskan, ada beberapa perubahan terkait materi di dalam UU, untuk mengakomodasi seluruh fraksi di DPR. Hal yang paling utama akan direvisi adalah mengenai perubahan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI.

Nantinya, akan ada penambahan satu wakil ketua di 16 AKD.

“Ada perubahan pasal yang perlu dibahas serius, dan sudah dibahas dengan pemerintah. Kita cari terobosan melalui UU No 12 tahun 2011 Pasal 20. RUU MD3 ini dapat diajukan DPR dan Presiden di luar Prolegnas. Dari sisi prosedur, apakah ini dapat dipenuhi, dengan menganggap RUU ini di luar Prolegnas. Biarkan ini tetap berjalan di paripurna,” tambah Totok.

Namun, tambah Totok, hal krusial yang saat ini menjadi kendala adalah masalah waktu. Pasalnya, mulai tanggal 5 Desember esok, DPR akan memasuki masa reses. Sehingga, proses ini harus dikebut. Ia juga mengingatkan kepada semua pihak agar mengawal dengan baik pembahasan revisi UU MD3, sehingga nantinya masyarakat luas yang akan diuntungkan.

Hadir pula sebagai narasumber dan mewakili pihak DPD RI I Wayan Gede Pasek. Senator asal Bali ini mempersoalkan kendala waktu yang diungkapkan Totok sebelumnya. Ia menilai, jika waktu yang mepet menjadi hal yang



Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto

krusial, tapi DPR malah justru terkesan mempersulit keadaan yang ada.

“Kami melihat, jika alasannya adalah waktu, seharusnya waktu pertama kali kami (DPD) mengajukan usulan revisi sudah harus direspon. Kalau alasannya tanggal 5 Desember, usulan DPD diterima saja tanpa harus dibahas,” kata Pasek.

Mantan Anggota DPR periode 2009-2014 ini menambahkan, putusan MK yang memenangkan DPD untuk dapat

terlibat dalam pembahasan UU MD3 tidak diindahkan oleh DPR, sehingga perdebatan tidak dapat dihindari. Namun, ia menegaskan, bukan berarti pihaknya merengek-rengok meminta untuk dilibatkan, namun karena ini sudah diatur secara konstitusional.

“Kenapa putusan MK yang sudah mengikat kenapa tidak dijalankan. Perlu kebesaran jiwa untuk menerima putusan tersebut. DPD siap menyelesaikan polemik ini, meski akan memakan waktu yang lama dalam prosesnya,” tegasnya.

Selain Totok dan Pasek, hadir pula sebagai narasumber adalah Anggota DPR Ruhut Poltak Sitompul (F-PD), Anggota DPR Daniel Johan (F-PKB), dan Direktur Advokasi, Monitoring, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri.

Ronald mengusulkan, agar DPR kembali menjadwalkan waktu reses, artinya tidak perlu langsung menjadwalkan reses per 5 Desember besok. Ia juga menilai, jika revisi ini terlalu buru-buru digulirkan, berindikasi menimbulkan insiden legislasi. (sf) foto: andri/parle/od

Komisi IX Temui Gubernur DIY



Ketua Komisi IX DPR RI berdialog dengan Gubernur DIY

Keputusan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terkesan terburu-buru. Sehingga kurang mempertimbangkan aspek yang lain salah satunya penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan sebelum kenaikan

harga BBM.

“Revisi UMK tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahapan, termasuk survey ulang KHL. Seandainya ingin direvisipun tidak bisa hanya di satu atau dua daerah, sebaiknya UMK di Seluruh Provinsi Indonesia, sehingga

membutuhkan proses yang cukup lama yaitu sekitar satu tahun.

Dalam kondisi seperti sekarang ini Presiden harus mengambil sikap dan solusi, bagaimana agar dampak dari kenaikan harga BBM tidak terlalu terasa bagi industri dan buruh,” ujar Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi se usai bertemu dengan Gubernur DIY dalam acara kunjungan spesifik Komisi IX DPR ke DIY, Senin (1/12) lalu.

Menurut Dede, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sempat dikeluhkan sejumlah pihak, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan minta penjelasan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri, termasuk yang berkaitan dengan kejelasan pengalihan subsidi BBM. Tindakan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

Dampak lain, kata Pimpinan Komisi IX ini, masalah transportasi adalah komponen yang cukup penting bagi buruh yang nilainya mencapai seperlima dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk itu Pemerintah tidak bisa lepas begitu saja, karena dampak dari



kenaikan BBM bersubsidi cukup mem-beratkan buruh. Sementara itu untuk memperbaiki UMK sulit dilakukan karena keterbatasan waktu.

Komentar serupa juga dikemukakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, UMK di DIY tidak mungkin direvisi, pasalnya sudah

diumumkan dan seandainya ingin dilakukan revisi membutuhkan waktu yang lama dan cukup panjang. (hr) foto: Eka Hindra/Parle/od

DPR Kaji Pembentukan Parlemen Asia

Wacana pembentukan Parlemen Asia mengemuka dalam Pembukaan Sidang Pleno ketujuh *Asian Parleментарary Assembly* (APA) di Lahore, Pakistan, 1-3 Desember 2014. DPR RI memandang wacana ini patut dikaji secara komprehensif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Benua Asia.

“Iya pembicaraan pembentukan Parlemen Asia ini sudah cukup lama, kita DPR tentu ikut mengkaji. Kalau pilihan itu baik untuk masyarakat di Asia, upaya meningkatkan kesejahteraan maka layak untuk dilanjutkan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon, usai mengikuti acara pembukaan di Lahore, Pakistan, Selasa (2/12/14).

Ia juga menyebut dalam pertemuan *executive committee* telah disepakati untuk membentuk Komite Khusus mendalami usulan pembentukan Parlemen Asia. Sejumlah negara sudah menyatakan berminat bergabung pada komite ini diantaranya Indonesia, Sri Lanka, Kamboja, Iran dan Jordan.

Sementara itu dalam Pidato Pembukaannya Presiden APA Syed Nayer



Delegasi Sidang APA foto bersama usai pembukaan sidang

Hussain Bokhari meyakini Parlemen Asia adalah solusi paling tepat bagi benua terpadat di dunia ini.

“Saya berkeyakinan dengan membentuk parlemen besar yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah dan berdiri sebagai penjaga kepentingan kita dapat mengatasi semua tantangan dan membangun masa depan Asia yang bisa kita banggakan,” ujarnya.

Ketua Senat Pakistan ini menambah-

kan sejumlah persamaan seperti sosio-ekonomi, geo-politik, kepentingan keamanan kawasan akan membuat wacana ini menjadi penting ke depan.

Selain isu Parlemen Asia, sidang Pleno ketujuh APA yang diikuti parlemen dari 23 negara Asia ini diharapkan dapat menyepakati sejumlah resolusi dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. (iky) foto: m Ibnur khalid/parle/od

Komisi V DPR Pertanyakan Penyimpangan PSO KA Rp682.7 Miliar



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia

Komisi V DPR Pertanyakan penyimpangan dalam pengelolaan serta pelaksanaan PSO Kerta Api (KA) tahun 2013 sebesar Rp682,76 Miliar.

“Penghitungan PSO yang tidak di-

dasarkan aturan perundang-undangan. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan BPK,” terang Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia kepada Parleментарia, Jumát, (5/12).

Pada pemeriksaan BPK semester I 2014 yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu

terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Menhub juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tariff, termasuk didalamnya IMO dan TAC.

“Untuk penetapan PSO ini, kami minta Menhub segera merealisasikan penenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” kata Yudi. (si) foto: rizka/parle

Akbar Usulkan Dewan Pengawas Century Dibentuk Kembali

Anggota DPR Akbar Faisal dari Partai Nasdem mengusulkan DPR membentuk kembali Dewan Pengawas Century. Pasalnya, kasus Bank Century membuat wajah DPR tercoreng karena masih belum tuntas persoalan tersebut.

“Penjualan bank mutiara (dulu Bank Century) didiclarmed oleh beberapa pihak terkait penjualannya. Saya meminta kasus Dewan Pengawas Century dibentuk lagi. Ini hutang dan membuat wajah DPR tercerong karena belum tuntas,” ujar saat Rapat Paripurna di Gedung DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Selasa, (2/12).

Dia mendesak seluruh pihak yang terlibat penjualan Bank Century segera diseret dan diadili karena telah memainkan hukum kita. “Dengan dibentuknya Dewan Pengawas Century, DPR

menjadi lebih bermartabat kembali,” katanya.

Pada Kesempatan itu, Akbar meminta BPK juga memberikan laporan keuangan kepada anggota DPR per daerah Pemilihan. “Jadi dengan ada laporannya kita dapat meningkatkan sisi pengawasan agar lebih terukur mengawasi kinerja pemerintahan,” jelasnya.

Pada hasil laporannya BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS senilai Rp1.25 Triliun terhadap Bank Mutiara penambahan modal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen PT Bank Mutiara diduga tidak sesuai ketentuan.

PT BM tidak menyampaikan posisi



Anggota DPR Akbar Faisal

kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada laporan keuangan publikasi bulan Juni s.d November 2013. Selain itu penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya efektif yang ditunjukkan antara lain adanya restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak sesuai peraturan perbankan, pelaporan kolektibilitas kredit atas persetujuan PT BM tidak sesuai dengan ketentuan. (Sugeng)

Foto: Naefuroji/Parle/od

Komisi VII Kunjungi Terminal BBM Pengapon Semarang



Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI Mulyadi saat pertemuan dengan jajaran Pertamina

Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (1/12/2014) mengunjungi Terminal BBM di Pengapon, Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Tim Komisi VII DPR Mulyadi mengatakan, kunjungan ini merupakan tugas DPR dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan.

“Banyak masukan-masukan dan banyak hal-hal yang perlu kita lakukan pengecekan di lapangan. Baik itu terkait ketersediaan BBM, kelangkaan BBM, dan penyalahgunaan BBM itu sendiri oleh oknum-oknum tertentu,” papar Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi VII saat pertemuan dengan Vice President People Management PT Pertamina, GM Pertamina

Pengapon, Anggota Komite BPH Migas, Kepala Dinas Kementerian ESDM Semarang, dan Kapolda Jawa Tengah yang diwakili Kabareskrim.

Maka dari itu, menurutnya, yang menjadi kunci adalah pihak Kepolisian. “Karena jika tidak ada polisi, kita tidak bisa menertibkan,” ujar politisi dari Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, Komisi VII perlu meninjau langsung bagaimana kondisi di Semarang, karena di tempat lain sering terjadi penyalahgunaan BBM bahkan ada yang di *back up* oleh pihak-pihak tertentu.

Mulyadi menyatakan, salah satu tugas DPR adalah memastikan jangan sampai terjadi kerugian negara yang berdampak kepada masyarakat. “Semakin banyak BBM yang digunakan untuk kepentingan yang sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk masyarakat miskin, maka makin besar pula kerugiannya karena pemerintah harus menambah alokasi anggaran terus,” jelasnya.

Dengan mengunjungi langsung ke lapangan, Mulyadi berharap, ada masukan-masukan yang baik untuk Pertamina terutama mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian BBM. Begitu pula permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Dari masukan-masukan tersebut, tentunya akan dijadikan bahan dalam rapat-rapat dengan pemerintah,” pungkasnya.

(sc) foto: suci/parle/hr.

Pemerintah Harus Maksimalkan Revitalisasi Pasar Tradisional



Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin saat meninjau pasar tradisional Bali

Komisi VI DPR RI menilai, peran Pemerintah masih kurang dalam memaksimalkan program revitalisasi pasar tradisional. Hal itu mengemuka saat Komisi VI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, Senin (1/2).

“Kami rasa perlu dibangkitkan lagi bantuan untuk revitalisasi pasar, minimal Rp 5 milyar dengan luas 2 are untuk

pasar tradisional di seluruh Indonesia” ungkap I Made Sudana selaku Kepala Pengelola Pasar Sindhu, Sanur Bali.

Pasar yang terletak 1,3 km dari Pantai Sanur ini mendapatkan apresiasi dari Tim Kunker Spesifik DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin. Penataan lapak, sistem pengolahan limbah dan fasilitas sanita-

sinya dinilai telah berhasil menerapkan desain modern tanpa meninggalkan kearifan tradisi lokal.

Pasar ini masih bersistem transaksi tradisional, mempersilahkan tawar menawar langsung dan terdapat altar sesaji di setiap lapaknya, yang merupakan ciri khas kepercayaan religi pedagang setempat yaitu beragama Hindu. Hal-hal inilah yang menarik bagi para turis, baik domestik maupun mancanegara untuk berbelanja di pasar ini, walaupun bukan pasar souvenir wisata.

Lebih lanjut DPR RI mendukung keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perlu diberi perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan. “Tradisi baik yang telah berjalan, ada koperasi para penjual dan pengelolaan dengan manajerial yang bagus harus dipertahankan. Pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait wajib mengawasi dan mengatur keberadaan mini market dan tempat perbelanjaan modern, ditata jangan sampai menjadi penghalang kemajuan pasar tradisional,” ujar Dodi menanggapi aspirasi yang telah disampaikan.

(ray) foto: rizka/parle

Komisi VII Pantau Dampak Kenaikan BBM Bagi Nelayan Indramayu

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra di Pantai Song, Kabupaten Indramayu Senin (1/12). Komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral ini ingin mengetahui secara langsung kondisi nelayan setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Ketua Komisi VII Kardaya Warnika apapun kebijakan yang dilakukan oleh negara adalah untuk rakyat, termasuk para nelayan. “Kami dari Komisi VII ingin melihat secara pasti dampak kenaikan BBM pada nelayan,” jelasnya, saat memimpin kunjungan.

Dalam pertemuan dengan sejumlah nelayan mereka mengeluhkan setelah harga solar naik, antrian ternyata masih panjang dan lama. Sudah sebulan masih juga belum mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapalnya, sehingga mereka belum bisa melaut untuk mencari ikan.

Salah seorang nelayan, Taryono, mengharapkan antrian BBM bagi nelayan dapat dipercepat. Sebelumnya dalam tiga



Ketua Komisi VII Kardaya Warnika saat berdialog dengan nelayan Indramayu

hari sudah dapat jatah BBM, tapi sekarang sudah sebulan belum juga mendapatkan giliran pengisian BBM.

“Saya rasa keberatan, jadi tolonglah bapak bijaksana bagaimana caranya nelayan jangan terhambat karena BBM, supaya ekonomi rakyat tidak tersendat-sendat,” keluhnya kepada para anggota dewan yang hadir.

Kasan, seorang nahkoda kapal nelayan juga menginginkan agar mudah mendapatkan bahan bakar solar. “Saya orang kecil, harga solar naik tidak dipermasalahkan tapi yang penting orang kecil jangan dipersulit untuk mendapatkannya,” katanya.

General Manager Marketing Pertamina Region III Afandi menjelaskan bahwa PT.Pertamina diberikan tugas untuk menyiapkan BBM bagi nelayan tapi dibatasi aturan dengan adanya kuota. “Kuota dibatasi sehingga pada SPBN ini juga dibatasi volumenya per bulan,” paparnya.

Pertamina sudah membicarakan hal ini kepada pengelola SPBN, bahwa kuota berlaku sebulan. Afandi menjelaskan kebijakan 4 bulan lalu kuota dibagi per minggu, hal itu

mengakibatkan antrian. “Mulai saat ini kita akan berlakukan lagi kouta per bulan. Nantinya SPBN yang akan mengatur supaya kapal yang GT kecil walaupun di akhir bulan akan tetap mendapatkan solar, tidak semua disedot kapal 30 GT keatas,” ungkapnya.

Dia mengkhawatirkan kuota diberikan seluruhnya kepada SPBN menjual lebih banyak kepada kapal 30 GT sehingga kapal dibawah 30 GT di akhir bulan kuota BBM sudah habis. Sekarang sudah ada kesepakatan dengan pengelola SPBN menjamin kapal di bawah 30 GT tetap akan disiapkan BBM sehingga terpenuhi kebutuhan BBM dan terlayani tanpa antrian yang panjang.

Dengan jaminan dari PT. Pertamina dan pengusaha SPBN, nantinya alokasi akan dilakukan dalam perhitungan per bulan, dan pengusaha SPBN akan mengatur nelayan kecil di bawah 30 GT bisa terlayani hingga akhir bulan dengan catatan disediakan stoknya. (as) foto : Agung/Parle/od

BKSAP Gelar Pelatihan Tenaga Ahli dan Peneliti Parlemen Asean



Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno foto bersama peserta workshop AIPA

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Teguh Juwarno mengatakan, selama dua hari mulai Selasa (2/12) sampai Rabu, BKSAP menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Work shop* atau pelatihan untuk tenaga ahli dan peneliti yang selama ini menjadi *supporting system* parlemen. Hadir para peneliti dan tenaga ahli dari 10 parlemen negara se Asean atau *Asean Inter Parliamentary Assembly* (AIPA). Ini sebuah rekor, sebab dalam pelatihan kali ini semua perwakilan tenaga ahli AIPA hadir.

Ditemui sesuai membuka acara pelatihan tersebut, Teguh Juwarno mengatakan, BKSAP DPR menjadi tuan rumah ini

bekerja sama dengan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta juga ada Lembaga swasta negara tersebut. Pelatihan ini menurut politisi PAN ini patut diapresiasi sebab peran *supporting system* mereka adalah dibutuhkan oleh parlemen kita.

Dari acara ini lanjut Teguh, mereka akan saling belajar pengalaman dari parlemen negara-negara lain dalam mendukung kerja-kerja parlemen. Selain itu, dan bisa berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan khususnya menghadapi *Asean Community Forum 2015*.

“Tentu tantangan yang dihadapi sangat besar, kita bersyukur dengan pelatihan ini akan banyak peneliti kita untuk memberikan yang terbaik bagi DPR,” jelasnya.

Sedangkan manfaat yang bisa dipetik DPR, menurut Teguh, parlemen kita khususnya para anggota memerlukan dukungan para peneliti, *legal drafter* maupun para tenaga ahli. Pelatihan seperti ini menjadi semacam *charge battery* mereka, sekaligus memperluas wawasan bagaimana mendukung kerja-kerja parlemen agar lebih akuntabel, lebih transparan dan ke depan parlemen kita bisa lebih dipercaya masyarakat.

Hadir dalam acara ini Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Deputi Persidangan dan KSAP Tatang Sutharsa, Sekjen AIPA P.O. Ram serta sejumlah pejabat dari Kedubes Jerman di Jakarta. (mp) foto: Andri/Parle/od

Komisi IX DPR Desak Pekerja Diberikan Dana Kompensasi

Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serikat pekerja di daerah Istimewa Yogyakarta mendesak adanya revisi UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Ketua

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi, saat pertemuan dengan Gubernur dan Pemda Provinsi DI. Yogyakarta. Senin (01/12), menerima tuntutan para pekerja Yog-

AKARTA tersebut.

Menurut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan ada revisi UMK 2015 dan menyebutkan desakan itu tidak mungkin dilakukan.

“Untuk menetapkan UMK harus ada survey harga pasar selama satu tahun. Kalau direvisi (UMK) berarti butuh waktu beberapa bulan lagi, padahal harga BBM sudah naik. Dan yang terpenting adalah memberikan kompensasi kepada pekerja dan pengusaha”, kata Dede saat memberikan keterangan pers.

Kompensasi yang dimaksud Dede, adalah penyediaan bus-bus khusus untuk para pekerja, mereka tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk kendaraan umum. Sebab, transportasi itu seperlima bagian dari perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mantan wagub Jabar itu menyesalkan sikap pemerintahan Jokowi yang



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi

menaikkan harga BBM saat pembahasan UMK belum selesai. Akibatnya, penetapan UMK memperhitungkan kenaikan harga BBM konkret sebesar

Rp. 2.000/liter.

“Rencananya kami akan tanyakan ke Presiden lewat menteri. Kalau ingin direvisi UMK, itu hanya bisa kalau seluruh Provinsi di Indonesia sepakat merevisi,” jelas Dede.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menegaskan UMK tidak akan direvisi. Tetapi ia kan menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan pada perusahaan untuk memberikan kompensasi kenaikan BBM kepada pekerjanya.

“Iya, ini masih dikoordinasikan,” kata Gubernur dan enggan menyebutkan rincian imbauan yang akan disebutkan dalam surat edaran itu. (hr). foto: Eka Hindra/Parle/od

Komisi IV DPR Terima Mahasiswa IPB



Suasana audiensi Komisi IV DPR dengan mahasiswa IPB

Komisi IV DPR menerima Mahasiswa/i IPB dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Dewan serta menjelaskan kerja politik Komisi IV DPR periode 2014-2019 kepada publik.

“Pertemuan ini merupakan permintaan Fakultas Ekologi Manusia yang dipimpin oleh Dekannya, dimana salah satu materinya yaitu Politik Ekologi Manusia,” ujarnya Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Gedung Nusantara I, Selasa, (2/12).

Menurut Herman, kunjungan ini sudah berjalan selama dua tahun dan telah memberikan dampak positif bagi mahasiswa karena mereka dapat mengetahui proses kerja politik di DPR khususnya Komisi IV DPR. “Ini telah berjalan selama dua tahun, dan kita secara esensi menjelaskan tugas fungsi kita dibidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk proses teknis melahirkan UU, dan mereka juga bisa menyampaikan aspirasinya disini,” jelasnya.

Dia menambahkan, Seluruh perguruan tinggi bisa mencontoh inisiatif dari IPB, karena melalui cara ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru yang mungkin banyak orang melihat apriori terhadap DPR dan anggota saat ini. (si) foto: Andri/Parle/od

DPR Harapkan Hubungan Indonesia-Spanyol Meningkat

DPR berharap, hubungan antara Indonesia dengan Spanyol meningkat. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga hubungan parlemen kedua negara. Hubungan itu meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, saat menerima kunjungan delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Negara Kerajaan Spanyol, di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Rabu (3/12/14).

Dalam kesempatan ini, Agus didam-

pingi oleh Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais (F-PAN) dan Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno (F-PAN). Sementara, delegasi Spanyol dipimpin oleh Ketua Komisi Luar Negeri Trinidad Jimenez.

“Kami ingin mempererat tali persaudaraan antar kedua negara, baik pemerintah maupun parlemen kedua negara. Banyak hal yang juga kita koordinasikan, agar dapat meningkat, seperti ekonomi, sosial, budaya, sampai ke pertahanan dan keamanan,” kata Agus, usai pertemuan.

Saat ini, jelas Agus, kerjasama kedua

negara mengalami kemajuan yang signifikan sebagai hasil dari *Senior Official Meeting* antar kedua Kementerian Luar Negeri, summit diplomacy, forum konsultasi, dan komunikasi yang intensif. Saat ini, informasinya sedang menyelesaikan draft *MoU on Political Dialog and Cooperation* di tingkat Menteri Luar Negeri.

“Dalam kerjasama di bidang ekonomi, pada periode Januari sampai dengan Agustus 2014, total perdagangan kedua negara mencapai US\$ 1,67 miliar, dengan surplus Indonesia sebesar Rp US\$ 966



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima Delegasi Parlemen Spanyol

juta, sedang menurut data perdagangan kedua negara per 2013 yang mencapai US\$ 2,35 miliar dengan surplus Indonesia sebesar Rp US\$ 1,26 miliar,” jelas Politisi Demokrat ini.

Sementara, kerjasama dalam bidang investasi negara Kerajaan Spanyol di Indonesia pada periode kuartal ke tiga

tahun 2014 mencapai US\$ 1,8 juta dalam 11 proyek, sedang menurut data investasi tahun 2013, mencapai US\$ 2,9 juta dalam 18 proyek.

“Dari data-data tersebut, kami memandang perlunya kerjasama bilateral antar pemerintah kedua negara yang terus diperkuat, dan perlu kiranya juga

diiringi oleh peningkatan kerjasama bilateral anta parlemen kedua negara,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Spanyol juga ingin memperkuat koordinasi dengan Indonesia. Parlemen Spanyol juga mengharapkan kunjungan parlemen Indonesia sebagai reprovokasi berkunjung ke Spanyol.

“Hubungan kedua negara, sudah sangat baik, tapi harus terus ditingkatkan. Kita harapkan hubungan kedua negara jauh lebih dekat, lebih bersahabat, koordinasi di berbagai bidang dapat menjadi hal yang jauh lebih mendekatkan kedua negara,” harap Agus.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari kedua belah pihak. Usai bertemu dengan Agus, Delegasi Parlemen Spanyol, akan bertemu dengan unsur Komisi I DPR, untuk membahas lingkup kerja hubungan internasional maupun pertahanan dan keamanan. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.

Korpri Menjadi Korps ASN



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memotong tumpeng pada HUT Korpri ke-43

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menyampaikan bahwa anggota Korpri harus melepaskan segala sifat ego sektoral dan ego daerah. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendukung kerja dewan, anggota Korpri di lingkungan Kesetjengan DPR diharap mampu bekerjasama dengan Kesetjengan MPR dan DPR yang berada dalam satu kompleks gedung parlemen.

“Saya berharap seluruh anggota Korpri di lingkungan Setjen DPR RI mampu bekerjasama dengan MPR dan DPD, karena selain berada dalam atap

yang sama yakni kompleks Parlemen, lingkup tugas dan pekerjaan ketiga kesetjengan itu satu sama lain juga saling terkait,” ujar Win, sesaat sebelum memotong tumpeng HUT Korpri ke-43.

Sementara itu Ketua Korpri Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha yang kali ini menerima potongan pertama tumpeng HUT Korpri dari Sekjen DPR RI, mengungkapkan bahwa usia 43 tahun jika diibaratkan manusia itu merupakan usia produktif. Demikian juga HUT Korpri kali ini, dimaknai sebagai momen yang tepat untuk mengubah *mindset* dan *cultureset* anggota Korpri

terutama dalam hal pelayanan dan dukungan kepada dewan. Jika yang semula lamban menjadi cepat, yang semula sulit menjadi mudah. Tentu dengan layanan yang tetap akurat dan akuntabel.

“Selain itu ke depan, yakni setelah lahirnya UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang harus ditindaklanjuti adalah perubahan nama Korpri atau Korps Pegawai Negeri yang berubah menjadi Korps ASN. Dimana dalam Korps ASN ini diketahui ada dua unsur di dalamnya, yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tuntutan dari semua perubahan itu adalah profesionalisme. Jika selama ini Korpri dimaknai sebagai organisasi yang lebih kepada paguyuban, sosial, ke depan Korpri diharapkan menjadi organisasi profesi yang professional,” jelas pria yang akrab disapa Toto ini.

Ditambahkan Ketua Korpri Setjen DPR sekaligus sebagai Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN ini, dalam kerangka reformasi birokrasi, pejabat bukan lagi didasarkan pada *authority* atau kekuasaan, melainkan pada *responsibility* atau tanggung jawab. Dengan demikian, pola yang diterapkan pun berubah, jika sebelumnya ingin dilayani, sekarang menjadi melayani. (Ayu) foto: Andri/Parle/od

Pengadaan Alat Deteksi Dini Bencana Alam Perlu Diprioritaskan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR meninjau Pusklat BNPB di Sentul, Bogor

Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna mendesak Pemerintah memprioritaskan pengadaan alat deteksi dini bencana alam. Seharusnya Indonesia yang juga kaya aneka bencana memiliki 70 ribu alat deteksi dini, tetapi hanya ada 50, itupun banyak yang rusak dan hilang dicuri.

Di sela-sela mengikuti kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Pusklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sentul, Bogor, Jumat (28/11) Choirul Muna mengatakan, Indonesia ini merupakan daerah rawan bencana

dari banjir, tanah longsor, gempa hingga letusan gunung. Karena itu masalah deteksi dini betul-betul diperhatikan.

“Saya mengusulkan Komisi VIII segera mengundang dan membicarakan masalah ini dengan BMKG dan BNPB membahas alat deteksi dini tersebut,” kata politisi Partai Nasdem ini. Anggota Dewan asal Dapil Jateng (Magelang) ini juga menyaksikan sendiri alat-alat deteksi dini Gunung Merapi banyak yang hilang dan rusak padahal alat ini sangat diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan mengurangi serta mencegah korban bencana lebih banyak.

Kapusdiklat Penanggulangan Bencana Nasional Bagus Tjahyono dalam paparannya kepada Tim Komisi VIII juga mengakui alat deteksi dini memang kurang sekali. Karena itu pihaknya tidak akan mengurangi kearifan lokal yang selama ini telah berjalan, misalnya woro-woro dari masyarakat setempat yang sangat membantu menanggulangi bencana.

Choirul Muna juga menyoroti anggaran *on call* untuk bencana alam yang hanya berjumlah Rp.1,6 T untuk seluruh Indonesia. Ia akan membicarakan dana tanggap darurat tersebut dengan BNPB, dan Departemen terkait. “Jangan sampai nanti waktu terjadi bencana, seperti tsunami di Aceh, justru LSM dari luar negeri yang duluan masuk sementara dari dalam negeri sendiri terhambat,” ia menjelaskan.

(mp) foto: Mastur Prantono/parle/od

Kurikulum 2013 Konsep Bagus Persiapan Kurang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan bahwa Kurikulum 13 secara konsep bagus namun dari sisi persiapan kurang.

“Tadi kami sudah mendapatkan kesimpulan dari semua pemangku pendidikan di Jawa Timur yang menginginkan Kurikulum 13 tetap dijalankan. Tetapi memang banyak kendala, terutama pada persiapan,” kata Ridwan usai pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Panja Kurikulum 13 dengan Wagub Jawa Timur dan jajaran pemangku pendidikan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (28/11)

Menurutnya, persiapan pelaksanaan Kurikulum 13 terkesan tergesa-gesa. Ia menjelaskan, bahwa hal ini sudah diingatkan Anggota Komisi X periode DPR 2009-2014 lalu, bahwa perlu dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada guru-gurunya.

“Dan ternyata memang saat ini ke-



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR menuju ruang pertemuan Gubernur Jatim

sulitan juga. Contohnya tadi dari SMA 5 dan SMP 1 Surabaya, bahwa gurunya harus pindah ke sekolah lain untuk menjadi pendamping di sekolah lain,”

papar politisi Partai Golkar ini.

“Jadi terlihat masalah guru belum selesai, apalagi dengan siswanya,” tambahnya.

Selain itu, masalah lain adalah buku, baik buku untuk guru maupun buku siswa. Menurut informasi, di Jawa Timur sudah 17 kabupaten yang mendapatkan buku dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Sementara di daerah lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dijelaskan Ridwan, yang menjadi permasalahan lain yaitu surat dari Mendikbud yang isinya dana Bos bisa dipakai sementara untuk menyelesaikan persoalan buku. “Kami khawatir nanti ke depan jadi double costing. Karena adanya surat itu, maka dana Bos akan dipakai,” ujarnya.

Padahal, kata anggota DPR dari

Dapil Jatim ini, dana Bos itu sudah diperjuangkan untuk kepentingan sekolah. Kalau digunakan untuk yang lain menjadi tidak sesuai lagi tujuannya, karena dana untuk kurikulum 2013 juga sudah ada. “Buku ini terlambat, tapi sudah dianggarkan dan ditenderkan, begitu buku datang, dana Bos sudah terpakai”. (sc)

Sekjen DPR Ajak Anggota Korpri Bekerja Lebih Baik Lagi



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memimpin Upacara HUT Korpri ke-43

Pegawai Negeri Sipil atau PNS Setjen DPR RI selama ini telah melayani masyarakat baik secara langsung, maupun melalui anggota dewan sebagai wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menjawab harapan Presiden Joko Widodo dalam Pidato tertulisnya yang disusun dalam rangka HUT KORPRI ke-43.

Meski demikian dilanjutkan Win, ia menyadari masih ada Kekurangan yang harus diperbaiki dan terus disempurnakan. Oleh karena itu Win mengajak seluruh anggota Korpri, khususnya

yang berada di lingkungan Kesetjenan DPR RI untuk bekerja dan bekerja lebih baik lagi untuk melayani masyarakat baik secara langsung maupun melalui dukungan terhadap anggota dewan yang merupakan representasi rakyat.

“Disini terlihat semangat Bapak Presiden menekankan pada perubahan mental. Setidaknya, jika masih ada kekurangan harus diperbaiki, dan jika selama ini sudah baik tetap harus ada yang disempurnakan. Dengan kata lain, ditekankan bahwa Korpri adalah pelayan masyarakat yang harus lebih

keras bekerja, bekerja dan bekerja untuk rakyat. Itulah yang dimaksud oleh Presiden, agar PNS tidak bermental Priyayi, dan tidak bermental penguasa. Bekerja untuk rakyat dengan sejujurnya dan seadil-adilnya. Dan itu sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua anggota Korpri,” papar Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti usai menjadi Pembina Upacara Peringatan Hut Korpri ke-43 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/12).

Dikatakan Win, dalam pemerintahan baru saat ini tentu banyak sekali aturan dan harapan-harapan yang diinginkan dari PNS. Hal tersebut sangat wajar, mengingat sebagaimana arahan presiden PNS dapat dikatakan sebagai unsur utama membangun bangsa, menegakkan kesatuan dan persatuan bangsa. PNS yang notabene sebagai anggota Korpri harus berada di garis terdepan untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan menciptakan kesejahteraan rakyat. (Ayu) foto: Rahayu Setyowati/Parle/od

DPR Apresiasi Positif Program Temui Wakilku

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi positif program temui wakilku di parlemen. Pasalnya, melalui program ini diharapkan dapat meluruskan persepsi negatif tentang DPR RI.

“Ini inisiatif bagus seringkali politik dianggap sesuatu yang kotor padahal politik itu netral, dan semuanya tergantung orangnya. Semua bidang seperti itu,”ujarnya saat menerima 30

perwakilan anak-anak penggiat sosial media, di Gedung DPR, Kamis Sore, (4/12).

Menurut Fadli, politik itu merupakan suatu bidang kehidupan, dan Politik merupakan alat saja untuk memperbaiki keadaan.

“Politik merupakan tempat Berkumpulnya orang yang memiliki pandangan yang sama dan ingin mengubah sesuai

platform itu dengan Pemilu secara damai dan konstitusional itu suatu cara demokratis,” ujarnya.

Dia menambahkan, Indonesia menganut konsep triaspolitika, jadi adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. “Eksekutif itu adalah pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan, legislatif itu membuat UU, budgeting, dan kontrol. Yudi-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon foto bersama Komunitas “Temui Wakilmu”

katif soal hukum. Kita banyak omong yah memang tugasnya mengontrol jadi Ketua DPR itu disebut *speaker*,” ujarnya.

Menurutnya, banyak orang salah persepsi terkait tugas dan fungsi Dewan. Memang tugas parlemen itu mengontrol. “DPR itu sejajar dengan Presiden untuk melaksanakan fungsinya kalau tidak di kontrol mrnjalankan sesuatu kita memasuki ruang yang lain itu menuju otoritarian,” jelasnya. (Sugeng), foto : *naefurodji/parle/hr.*

Komisi VIII Tekankan Kepala BNPB Tak Takut Datang ke DPR



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR dipimpin Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay kunjungi Pusdiklat BNPB Sentul, Bogor

Lebih lanjut Saleh mengatakan, peninjauan ke Gedung Pusdiklat BNPB di Sentul Bogor sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengendalian bencana di Indonesia. DPR ingin melihat langsung kondisi gedung, program kerja, penganggaran serta kesiapan SDM menghadapi bencana di tanahair. “Jadi kami tahu Gedung Pusdiklat dan ke depan bisa memperjuangkan peningkatan fasilitas dan dukungan anggarannya,” sebut Saleh.

Dia mengapresiasi program kerja dan kebijakan yang akan diambil Pusdiklat, bagaimana menyiapkan pejabat terkait, teknis di lapangan dan yang utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat agar siap sedia untuk berhadapan dengan bencana yang akan terjadi.

Kalau cukup anggarannya, simpul-simpul masyarakat memang perlu diberi pelatihan. Dari penjelasan Kapusdiklat yang melibatkan masyarakat dinilai sangat penting, seperti tsunami Aceh. Karena lokasi yang sulit dijangkau maka peran masyarakat setempat dan memegang peran penting yang siap sedia bantu korban yang lebih parah.

Kepala Pusdiklat BNPB Bagus Tjahyono dalam penjelasan singkatnya menyebutkan, Indonesia selain dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, juga dianugerahi banyaknya bencana. Di tanah air kita ada 12 macam dan Indonesia juga disebut laboratorium kebencanaan. Di daerah ada 437 badan penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. (mp) foto: *Mastur Prantono/parle/od*

Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay mengatakan persoalan yang ada di DPR telah selesai. Karena itu lewat Kepala Pusdiklat BNPB diminta menyampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif jangan pernah takut untuk datang ke DPR.

“Ini penting saya sampaikan karena kerja-kerja yang disampaikan Kapusdiklat BNPB ini betul-betul perlu penanganan dan tindak lanjut. Bisa jadi banyak agenda strategis yang disampaikan Kapusdiklat akan terbelengkelai,” ungkap Saleh saat memimpin kunjungan spesifik Komisi VIII DPR ke Gedung Pusdiklat BNPB di Sentul, Bogor, Jumat (28/11)

Sebanyak 17 anggota DPR ikut dalam acara ini dari 10 fraksi yang ada di DPR termasuk tiga wakil Ketua Deding

Ishak dari FPG, Sodik Mudjahid dari F Geribdra dan Ledia H. Amaliah dari FPKS. Karena itu kata Saleh P. Daulay yang juga politisi Fraksi PAN ini, meminta surat edaran (SE) Menseskab yang melarang menteri atau kepala badan dilarang ke DPR itu dicabut.

“Tidak boleh itu, DPR itu tugasnya membantu sedapat mungkin pekerjaan pemerintah. Pekerjaan teknis dilakukan oleh pemerintah tapi masalah lain menyangkut kebijakan dan penganggaran menjadi tugas teman-teman di DPR,” ia menjelaskan. Sejumlah anggota menyatakan kecewa adanya lantaran Kepala BNPB tidak hadir dalam acara ini. Padahal agenda Komisi VIII kali ini adalah kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan persiapan BNPB menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.



Komisi VI DPR RI beraudiensi dengan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Pantai Indonesia (IPERINDO) dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, Rabu (3/12) Foto: Iwan Armanias/Parle/iw



Rapat Pleno Panja BURT DPR RI bahas Anggaran 2015 dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan Novita Wijayanti. Foto: Eka Hindra/parle/Hr



Ketua Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim dan pemangku pendidikan di Surabaya, Kamis (27/11) Foto: Suciati/Parle/Hr